

BAB I

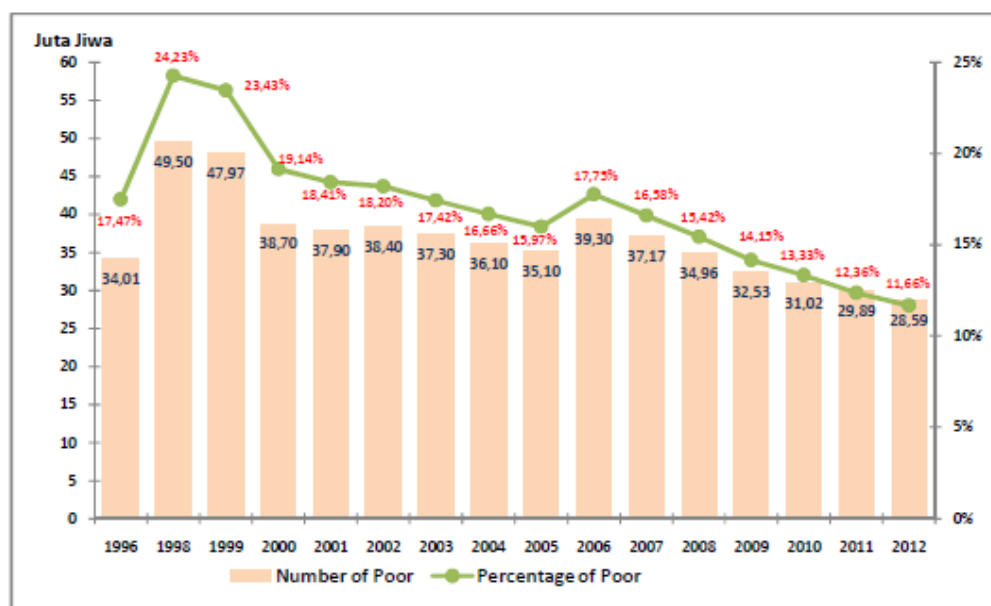
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan bersifat multi dimensional dan semakin disadari tidak hanya sekedar masalah ekonomi-keuangan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan maupun kemampuan membeli barang dan jasa (pengeluaran). Sebagaimana dijelaskan oleh Paul Shaffer (2008), perkembangan pemikiran dan perhatian terhadap aspek kemiskinan menunjukkan perubahan mendasar dimana konsep kemiskinan semakin luas (bukan hanya *physiological deprivations*, namun hingga mencakup *social deprivations*), penyebab kemiskinan semakin luas (termasuk sosial, politik, budaya, kekerasan dan sumber daya alam), dan fokus kemiskinan semakin dalam (mencakup hingga strategi perlindungan sosial, mitigasi dan pengurangan resiko) (Kementerian SekNeg, 2013).

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa krisis multidimensional yang terjadi pada periode 1997-1998 telah membalikkan trend penurunan kemiskinan dan menyebabkan angka kemiskinan melonjak hingga mencapai 49,50 juta jiwa (atau 24,23%) pada tahun 1998. Sebagaimana terlihat dalam gambar 1 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (1996-2012), secara bertahap angka kemiskinan terus menurun menjadi 35,10 juta atau 15,97% (2005), 32,53 juta atau 14,15% (2009), dan pada bulan September 2012 menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,66% dari populasi penduduk (BPS, 2012). Angka

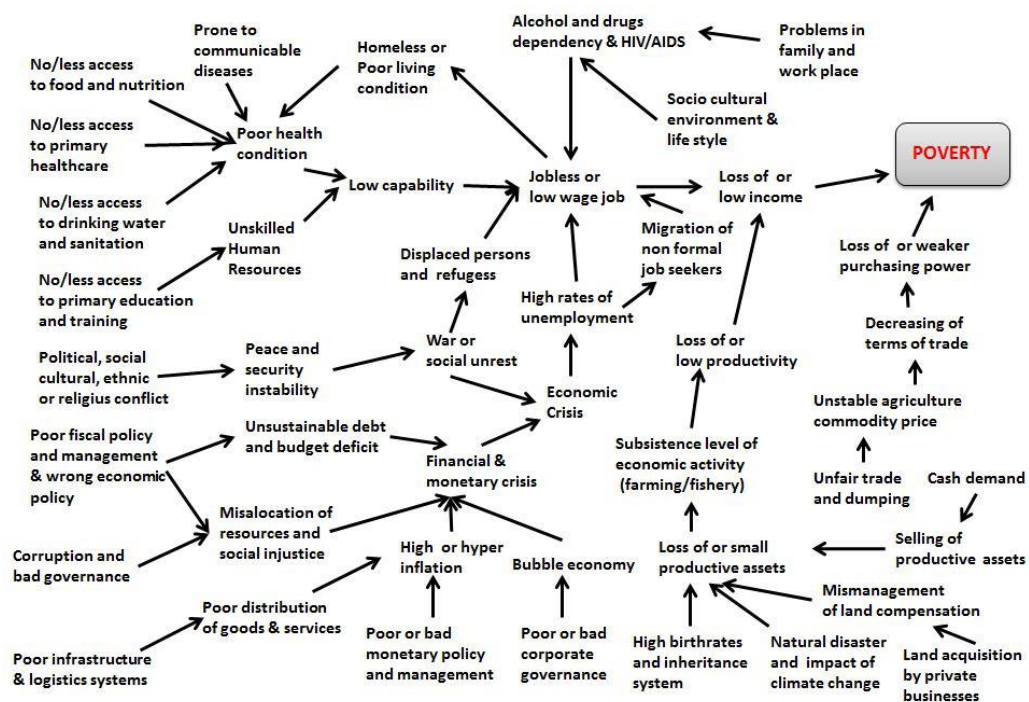
kemiskinan yang dilansir oleh BPS tersebut menggunakan *nilai garis kemiskinan*, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori/kapita/hari dan non makanan, yaitu perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (1996-2012)
(Sumber : BPS 2012)

Permasalahan kemiskinan di Indonesia dibayang-bayangi pula dengan keberadaan kelompok masyarakat “Hampir Miskin” yang berada pada tingkatan sedikit diatas garis kemiskinan dan sangat rentan untuk sewaktu-waktu masuk menjadi kelompok miskin apabila terjadi tekanan eksternal, seperti kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga BBM dan listrik, pemutusan hubungan kerja (PHK), konflik sosial maupun bencana alam.

Kemiskinan merupakan meta masalah (masalah di atas segala masalah), sehingga untuk mengatasinya harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh masalah pada tingkat dibawahnya (*low level problem*), seperti masalah kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan dan nutrisi, air bersih dan sanitasi, akses permodalan, ketersediaan infrastuktur, dampak perubahan cuaca dan bencana alam, konflik dan kekerasan, stabilitas keamanan, korupsi, *bad governance* yang mengakibatkan misalokasi sumber daya alam dan ketidakadilan sosial, kepemilikan aset produksi, nilai tukar petani/nelayan, angka kelahiran yang tinggi, pengelolaan fiskal dan moneter, hingga *bad corporate governance* yang menyebabkan *bubble economy* dan krisis keuangan (Abdini, 2012). Anatomi kemiskinan di Indonesia secara komprehensif dapat terlihat pada diagram berikut ini:



Gambar 2. Anatomi Kemiskinan di Indonesia Secara Komprehensif
(Sumber : Abdini, 2012)

Kompleksitas anatomi kemiskinan tersebut menyebabkan permasalahan kemiskinan tidak hanya dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi semata, namun sangat terkait dengan dinamika sosial, politik dan budaya yang melekat dalam suatu komunitas, sehingga pengentasan kemiskinan bersifat multi-dimensi dan memerlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antar Sektor dan antar Regional.

Strategi besar Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan *Four Track Strategy*, yaitu: *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro environment* (Firmansyah, 2012). Strategi 4 jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (*growth with equity*) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan juga dapat semakin dikurangi. Agenda besar pembangunan nasional tersebut telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014. Hal ini dipertegas kembali dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP 2013 yang mengangkat tema “*Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat*” (RPJM 2010-2014).

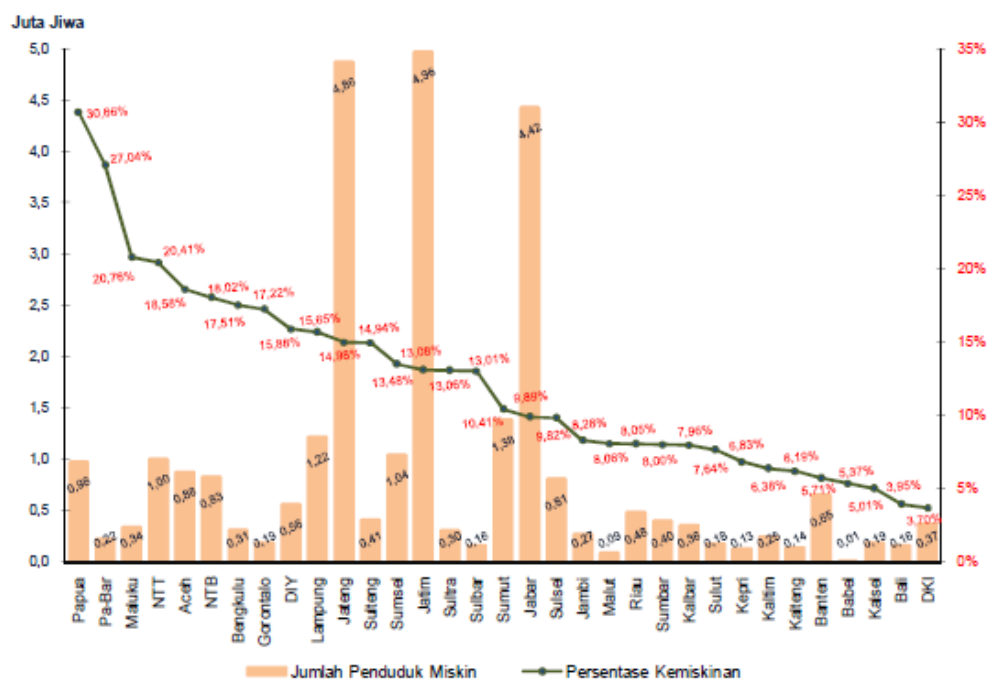
Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2011):

1. Klaster Pertama: Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Klaster Kedua: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.
3. Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui pembagian klaster bertingkat tersebut diharapkan kelompok keluarga miskin yang awalnya menjadi penerima program klaster 1 akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan selanjutnya naik kelas menjadi penerima program klaster 2 untuk terus memperbaiki kehidupannya hingga mampu memanfaatkan program klaster 3 dan akhirnya diharapkan dapat keluar dari

jeratan masalah kemiskinan. Untuk memperkuat strategi 3 klaster tersebut, Pemerintah sejak tahun 2011 meluncurkan Klaster Keempat yang terdiri dari Program Rumah Murah, Transportasi Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, serta Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2011).

Meskipun Program Pengentasan Kemiskinan terus ditingkatkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kantong-kantong kemiskinan masih tetap ada. Hal ini dapat dilihat dalam sebaran kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa (55,33%) dan Sumatera (21,6%), diikuti oleh Pulau Sulawesi (7,15%), Bali & Nusa Tenggara (6,90%), Maluku dan Papua (5,69%) serta Kalimantan (3,26%) (BPPS, 2012).



Gambar 3. Persebaran Kemiskinan berdasarkan Provinsi (2012)
(Sumber : BPPS Tahun 2012)

Seperti tampak dalam gambar 3, tampak bahwa angka kemiskinan terbesar terdapat di Jawa Timur (4,96 juta), Jawa Tengah (4,86 juta) dan Jawa Barat (4,42 juta). Beberapa provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki penduduk miskin lebih dari 1 juta jiwa adalah Sumatera Utara (1,37 juta), Lampung (1,21 juta), Sumatera Selatan (1,04 juta) dan NTT (1,00 juta). Sedangkan angka kemiskinan terendah dijumpai di Kepulauan Riau (131 ribu), Maluku Utara (88 ribu) dan Bangka Belitung (70 ribu).

Sedangkan apabila dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin terhadap populasi penduduk di masing-masing provinsi, maka terdapat 16 Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas prosentase nasional (11,66%), dimana Provinsi yang memiliki prosentase kemiskinan tertinggi adalah Papua (30,66%), Papua Barat (27,02%), Maluku (20,76%), NTT (20,41%), Aceh (18,58%) dan NTB (18,02%). Di sisi lain Provinsi yang memiliki prosentase kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta (3,70%), Bali (3,95%), Kalimantan Selatan (5,01%), Bangka Belitung (5,37%) dan Banten (5,71%) (BPPS, 2012).

Mencermati tingkat dan jumlah kemiskinan yang bervariasi di masing-masing Provinsi, maka efektivitas program pengentasan kemiskinan tidak dapat lepas dari peranan aktif Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Secara konseptual Strategi Pengentasan Kemiskinan Nasional (*National Poverty Reduction Strategy*) adalah penting namun tidak mencukupi. Diperlukan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mempertajam program dan target penerima sasaran melalui Strategi Pengentasan

Kemiskinan Daerah (SPKD) yang mencakup inisiatif dan kearifan lokal (Suryahadi, 2010).

Perhatian yang semakin besar terhadap penduduk miskin dari pemerintah dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini telah ditunjukkan dengan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010. TNP2K dibentuk dengan susunan organisasi: a. Ketua: Wakil Presiden; b. Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; d. Sekretaris Eksekutif: Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat. e. Anggota: 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Sosial; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Pendidikan Nasional; 6. Menteri Pekerjaan Umum; 7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 10. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 11. Sekretaris Kabinet; 12. Kepala Badan Pusat Statistik; 13. Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh ketua (Sekretariat TNP2K, 2010).

Pembentukan TKPK Nasional, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005, dimaksudkan untuk menjalankan fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah konkret untuk mengkoordinasikan seluruh program

penanggulangan kemiskinan, baik program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Di samping penajaman program pengentasan kemiskinan dan target sasaran serta penguatan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan penting untuk memastikan situasi yang kondusif di wilayahnya. Sebagai garda terdepan Pemerintah RI dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu pula memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan dasar di daerahnya agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya ekonomi yang tidak wajar, termasuk ancaman kelangkaan dan kenaikan harga (inflasi) bahan pokok. Pemahaman yang mendalam dari Pemerintah Daerah terhadap wilayahnya akan memperkuat stabilitas maupun ketahanan ekonomi sehingga kelompok masyarakat yang rentan akan terhindar dari ancaman gejolak eksternal yang akan menyebabkan mempengaruhi daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Partisipasi aktif Pemerintah Daerah tersebut pada akhirnya bukan hanya akan menjamin keberhasilan pembangunan di daerahnya, namun secara sentrifugal akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keadilan sosial-ekonomi. Pemda Kabupaten Sleman sebenarnya pada tahun 2004 telah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), sebuah dokumen komprehensif yang memuat secara rinci pengertian tentang kemiskinan, bentuk-bentuk kemiskinan, berbagai penyebab terjadinya kemiskinan, serta langkah-langkah konkret untuk mengatasi masing-masing bentuk kemiskinan. SPKD dilaksanakan

mulai tahun 2005 oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) yang diketuai oleh Bupati.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman Tahun 2011–2015

Tujuan	Sasaran	
1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin sehingga menjadi tidak miskin 2. Meningkatnya kualitas perlindungan dan layanan bagi keluarga sangat miskin.	1.	Semua warga sangat miskin memperoleh layanan dasar berupa jaminan pelayanan kesehatan dan wajib belajar 12 tahun, sampai dengan tahun 2015
	2.	Tersedia data dan profil warga miskin di 86 desa, tahun 2012
	3.	Terwujud sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, mulai tahun 2011
	4.	Terlaksana sinergi pemerintah-masyarakat-swasta dalam penanggulangan kemiskinan, mulai tahun 2011
	5.	Terwujud partisipasi swasta dalam penanggulangan kemiskinan, mulai tahun 2011
	6.	Tersedia data kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di 86 desa, tahun 2012
	7.	Terlaksananya revitalisasi kelembagaan TPK kecamatan, TPK Desa, TPK Padukuhan pada tahun 2012
	8.	Tercapai penurunan jumlah keluarga miskin menjadi 15 persen dari total keluarga pada tahun 2015

(Sumber : *Draft Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Sleman Tahun 2011*)

Dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, maka Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) dilebur menjadi TKPK Kabupaten Sleman dengan Wakil Bupati sebagai ketua. Strategi penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan diharapkan bisa mencapai hasil yang optimal, karena berbeda dengan TPKD yang pelaksanaannya

terbatas pada unsur-unsur yang ada di lingkungan Pemda Sleman, TKPK Kabupaten Sleman melibatkan secara sinergis semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), mulai dari perguruan tinggi, sejumlah besar LSM yang ada di Provinsi DIY, serta pihak swasta sebagai anggota. Dengan terbinanya kerja sama yang sinergis tersebut penurunan jumlah keluarga miskin menjadi 15 persen dari total keluarga pada tahun 2015, seperti tercantum pada Tabel 1 di atas akan lebih mudah dicapai (Sekretariat TNP2K, 2011).

Dari data yang dihimpun secara lengkap oleh TPKD dengan menggunakan indikator kemiskinan dalam semua sektor kehidupan, mulai dari data keluarga miskin tingkat dusun, desa, sampai pada tingkat kecamatan, terlihat bahwa SPKD yang sudah dijalankan sejak tujuh tahun belakangan oleh Pemda Kabupaten Sleman telah berhasil menurunkan persentase keluarga miskin di 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Secara agregat penurunan persentase keluarga miskin tersebut dapat dilihat dari Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman Tahun 2006–2011

Tahun	KK Miskin	Persentase (%)
2006	62.518	25,46
2007	58.701	23,40
2008	56.867	22,25
2009	65.157	22.17
2010	57.979	19.72
2011	50.603	19,80

(Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Kabupaten Sleman, 2011)

Perlu dijelaskan bahwa sekalipun terjadi penurunan jumlah keluarga miskin secara absolut dari 57.979 pada tahun 2010 menjadi 50.603 pada tahun 2011, dilihat dari persentase terjadi kenaikan menjadi 19,80 persen pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 sebesar 19,72 persen. Kenaikan persentase itu

disebabkan oleh peningkatan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Cangkringan sebagai dampak bencana Merapi. Seperti telah disebut di atas, jumlah keluarga miskin di Kecamatan Cangkringan telah bertambah dari 2.728 kepala keluarga pada tahun 2010 menjadi 4.186 kepala keluarga pada tahun 2011. Walaupun terdapat kenaikan sebanyak 1.458 keluarga miskin di kecamatan ini, pengaruhnya pada persentase penambahan penduduk miskin untuk seluruh kabupaten tidak berarti, yaitu hanya sebesar 0,08 persen (Bappeda Kabupaten Sleman, 2011). Ini disebabkan telah terjadi penurunan persentase keluarga miskin secara signifikan (di atas 5 persen) di 14 kecamatan lainnya dari tahun 2010 ke tahun 2011, seperti dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Kenaikan vs Penurunan Jumlah Kepala Keluarga Miskin per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2011 Dibandingkan Dengan Tahun 2010

No	Kecamatan	Tahun 2010	Tahun 2011	+/- %
1	Moyudan	2068	1896	-9,1
2	Minggir	3190	2686	-18,8
3	Seyegan	4027	3604	-11,7
4	Godean	4047	2723	-48,6
5	Gamping	3990	3291	-21,2
6	Mlati	3981	3204	-24,3
7	Depok	1802	1466	-22,9
8	Berbah	3287	2361	-39,2
9	Prambanan	3501	3215	-8,9
10	Kalasan	3564	3611	+1,3
11	Ngemplak	3194	2457	-30,0
12	Ngaglik	3305	2399	-37,8
13	Sleman	6521	5393	-20,9
14	Tempel	4908	4792	-2,4
15	Turi	2518	2218	-13,5
16	Pakem	1348	1101	-22,4
17	Cangkringan	2728	4186	+34,8

(Sumber : Bappeda Kabupaten Sleman, 2011)

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama satu tahun terakhir (2010–2011) telah terjadi penurunan persentase kepala keluarga miskin di Kabupaten Sleman sebesar 14,6 persen. Persentase penurunan ini tentu akan lebih besar bila tidak terjadi kenaikan drastis persentase kepala keluarga miskin di Kecamatan Cangkringan sebesar 34,8 persen. Selain Kecamatan Cangkringan, kecamatan lain yang juga meningkat persentase kepala keluarga miskinnya adalah Kecamatan Kalasan, meskipun tidak signifikan, hanya sebesar 1,3 persen. Pertambahan jumlah kepala keluarga miskin di kecamatan ini sebenarnya merupakan dampak dan imbas yang tidak besar dari bencana erupsi Merapi.

Kecamatan Kalasan juga menerima dampak dari aliran lahar panas ketika sedang berlangsung erupsi Merapi yang mengalir sepanjang lebih dari 16 kilometer dari puncak gunung Merapi ke arah selatan, memasuki Kali Opak yang berada di kecamatan ini. Kecamatan ini mendapat aliran lahar dingin dari Kali Gendol di utara yang selanjutnya berubah menjadi nama menjadi Kali Opak begitu memasuki wilayah Kecamatan Kalasan. Warga yang mendadak menjadi miskin di kecamatan ini adalah warga yang lahanda rumahnya berada di sepanjang aliran Kali Opak ini. Selain itu, meningkatnya jumlah keluarga miskin di Kecamatan Kalasan juga disebabkan tidak berfungsinya Saluran Mataram. Saluran irigasi primer yang berhulu dari Kali Progo dan membentang dari ujung barat sampai ke ujung timur wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bermuara di Kali Opak ini menjadi tidak berfungsi karena dipenuhi lahar dingin dan abu vulkanik. Akibatnya, para petani di beberapa kecamatan sepanjang aliran saluran ini, termasuk kecamatan Kalasan, tempat bermuaranya saluran Mataram,

tidak bisa menggarap sawahnya karena tidak ada air sama sekali. Keluarga yang menjadi miskin umumnya adalah yang tidak memiliki sumber mata pencaharian utama selain sebagai petani sawah.

Penurunan Jumlah Kepala Keluarga Miskin per Kecamatan, Kabupaten Sleman Tahun 2011 dibandingkan Dengan Tahun 2010 untuk peringkat pertama yaitu kecamatan Godean yaitu 4047 KK pada tahun 2010 menjadi 2723 KK pada tahun 2011, yang berarti mengalami penurunan 48,6%. Yang kedua adalah kecamatan Berbah yaitu 3287 KK pada tahun 2010 menjadi 2361 KK pada tahun 2011, yang berarti mengalami penurunan 39,2%. Yang ketiga adalah kecamatan Ngaglik yaitu 3305 KK pada tahun 2010 menjadi 2399 KK pada tahun 2011, yang berarti mengalami penurunan 37,8%.

Sehingga berdasarkan data penurunan jumlah KK miskin di tiga wilayah tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di kecamatan Berbah, dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Berbah berada di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Selain itu kecamatan Berbah pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori Pembina Lingkungan dan pada 29 Februari 2012 dianugerahi Kehati Award sebagai Pendorong Lestari Kehati atas kerja kerasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati (<http://berbahkec.slemankab.go.id/>).

Kecamatan Berbah meliputi wilayah seluas 2.299,00 ha, atau merupakan kecamatan dengan wilayah tersempit di Kabupaten Sleman. Secara administratif Kecamatan Berbah terbagi ke dalam empat Desa, yaitu Sendangtirto, Tegaltirto,

Jogotirto dan Kalitirto. Dari keempat desa tersebut, Jogotirto menempati wilayah terluas, yaitu 621,00 ha, sedangkan wilayah tersempit adalah Sendangtirto, yang meliputi kawasan seluas 522, 00 ha.

Dari jumlah penduduk sebanyak 42.550, sebagian besar di antaranya, yaitu berjumlah 39.164 orang memeluk agama Islam. Pada urutan ke dua adalah agama Katolik yang dianut oleh 2 261 orang penduduk kecamatan ini, kemudian disusul oleh agama Kristen yang dianut oleh 1.093 orang. Bila diperinci per desa, terlihat bahwa proporsi pemeluk agama di masing-masing desa proporsional dengan komposisi pada level kecamatan. Jumlah penduduk beragama Katolik cukup menonjol ditemukan di desa Kalitirto, yaitu sebanyak 1.286 dari 10.925 penduduknya.

Secara umum, ekonomi di Kecamatan Berbah digerakkan oleh sektor yang terkait dengan pertanian, dan sektor non-pertanian. Aktivitas pertanian di kawasan ini sebagian besar dilakukan di atas tanah sawah irigasi teknis, yang meliputi kawasan seluas 1.219,50 ha. Di atas lahan ini ditanam padi dan palawija. Sistem irigasi di kawasan ini berjalan dengan baik dengan beroperasinya dua bendungan irigasi masing-masing di Sungai Opak dan Sungai Kuning. Aliran air yang teratur, terutama pada musim-musim hujan, menyebabkan tanah sawah di kawasan ini dapat memanen padi sebanyak 2 sampai 3 kali per tahun, dan 1 sampai 2 kali panen palawija. Dilihat dari kepemilikan tanah per rumah tangga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani di Kecamatan Berbah adalah *petani kecil*, yang memiliki tanah kurang dari 0,25 ha, yaitu sebanyak 1.481 orang. Sementara itu hanya ada 45 rumah tangga yang memiliki tanah lebih dari 1,25 ha.

Selain oleh sektor pertanian, ekonomi di Kecamatan Berbah juga digerakkan oleh sektor non-pertanian, yaitu sektor industri dan jasa. Terdapat tiga industri besar yang berlokasi di Desa Kalitirto dan Sendangtirto; empat industri skala sedang yang masing-masing berlokasi di Desa Jogotirto, Tegaltirto dan Kalitirto. Selain itu terdapat usaha pertambangan, yaitu tanah liat dan batu putih. Pertambangan tanah liat ini dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata. Sektor jasa yang terdapat di kawasan ini antara lain usaha angkutan umum (bis), pertukangan kayu, pertukangan batu, cukur, jahit, salon kecantikan, perbengkelan, penggilingan padi, toko, dan warung makan. Di antara usaha-usaha jasa tersebut, pertukangan batu adalah yang paling menonjol, yaitu dengan jumlah 591 buah.

Ada empat faktor atau variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah 1) Komunikasi, 2) Sumber daya (*resources*), 3) Disposisi dan 4) Struktur birokrasi (Dwiyanto, 2009: 10). Sedangkan menurut Donald P. Warwieck (1988:17) dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek yaitu faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*impeding conditions*).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi program penanggulangan kemiskinan PKH yang dilakukan di Kecamatan Berbah.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Berbah tahun 2013?
2. Faktor-faktor apa saja yang berperan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Berbah tahun 2013?

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menggambarkan implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Berbah tahun 2013.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Berbah tahun 2013.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan pemikiran berupa konsep bagi pengembangan studi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan proses implementasi program dan juga dapat dijadikan salah satu pijakan bagi pihak yang akan memperdalam tentang hal yang sama pada penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan.